

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Majid. 2010. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin. Semarang.

Amiroeddin Sjarif. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. PT Rinneka Cipta. Jakarta.

Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. sinar grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo. 2014. *pidana dan pemedanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Elmarianti saalino. 2019. *Hukum Militer di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia. JawaTimur.

Hartono. 2010. *Penyidikan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. sinar Grafika. Jakarta.

Ishaq. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Rajawali Pers. Depok.

Josias simon runturambi dan Atin sri pujiastuti. 2015. *senjata api dan penanganan tindak kriminal*. Yayasan Pustaka obor Indonesia. Jakarta.

Moch.Faisal Salam. 1994. *peradilan militer Indonesia*. cv. Mandar maju. Bandung.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. kencana Prenada. Jakarta.

Rahman Amin. 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. cv budi utama. Yogyakarta.

Rahman Syamsuddin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesai*. kencana.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. PT CitraAditya Bakti. Bandung.

Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan*. Garsindo. Jakarta.

Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.

### **Undang-Undang dan Peraturan Sejenis**

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pemeliharaan senjata api di lingkungan kementerian pertahanan dan tantara nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentaran Nasional Indonesia.

Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANNTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFPALINGE" (STBL. 1949 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api.

Undang-Undang Republik Inodesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Republik, Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

## Artikel Dalam Jurnal dan Majalah

Anisa Nurchassana Utomo, Idha Sri Suryani, Nesya Artia Melly. “pembuktian dakwaan oditur militer dalam pemeriksaan secara in absentia pada persidangan perkara desersi di masa damai (putusan p.m ii-09 bandung nomor : 105-k/pm.ii-09/au/vi/2014)”. bagian hukum acara universitas sebelas maret. jurnal Verstek. vol.4 No.2. 2016.

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. “Hukum disiplin prajurit tantara nasional Indonesia/Militer pada komando distrik militer 0807/tulungagung”. jurnal Hukum. fakultas hukum Universitas tulungagung. vol.3 No.1.

Chinitra Septin Prawesti. “pertimbangan hakim pengadilan militer iii-12 surabaya dalam memutus tindak pidana desersi pada waktu damai”. jurnal verstek. volume 5 nomor 1 1999. bagian hukum acara fakultas hukum universitas sebelas maret.

Dwi Yulianti, Sabar Slamet. “Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin oleh warga sipil”. jurnal, fakultas Hukum universitas Sebelas Maret Surakarta. vol. 3 No.3. September - Desember 2014.

Eka Martiana Wulansari. “Hukum disiplin prajurit tantara Indonesia (TNI) paska reformasi”. jurnal Rechts vinding. Fakultas hukum Universitas Semarang. vol. 7 No. 1 april 2011.

Jacob Hattu. “pertanggungjawaban pidana jenazah Covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus”. jurnal belo. vol. 6 No. 1 Agustus 2020 – januari 2021.

Marfuatul Latifah. “Kepemilikan dan Penyalahgunaan senjata api di Indonesia”. Majalah Info Hukum. Vol. IX. Nomor 22 November 2017.

Mukhlis R. “Tindak pidana di bidang pertanian di kota pekan baru”. jurnal ilmu hukum. vol 4 No. 1 November 2013.

Munsharif Abdul Chalim, Faisal Farhan. "peranan dan kedudukan tantara nasional Indonesia (TNI) di dalam rancangan undang-undang keamanan nasional di tinjau dari perspektif politik hukum di Indonesia". jurnal pembaruan hukum. Dosen Fakultas Hukum UNISSULA. volume II No. 1 Januari-april 2015.

Reynaldi ginting, hasvian milala, fredrick sitopu. "analisis hukum penetapan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap suatu tindak pidana" jurnal hukum. Fakultas Hukum universitas prima Indonesia. Vol 4 No. 2 Mei 2014.

### **Skripsi dan Disertasi**

Dwi Ratna Puspitasari. 2010. "*analisis yuridis bentuk dakwaan dan strategi pembuktian penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi (studi kasus putusan pengadilan negeri banyumas nomor: 116/pid.b/2009/pn.bms)*". skripsi. fakultas hukum. universitas sebelas maret Surakarta.

Natalia Mayasari. 2008. "*Penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi Yang dilakukan oleh anggota tni dalam lingkungan peradilan militer (studi kasus di pengadilan militer ii-11 yogyakarta)*". Skripsi. fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta.

Refa Gianza Hearvian. 2009. "*penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api illegal (Studi putusan nomor 853/pid.B/2017/PN pdg dan putusan nomor 129/pid.Sus/2016/PN Kag)*". Skripsi. sarjana hukum. Fakultas hukum Universitas Andalas.

### **Internet**

<https://kbbi.lektur.id/senjata-api> . diakses pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 15.47 WITA.

